



DOKUMEN PEMBELAJARAN PROYEK/PRAKTEK TERBAIK

Desain Pengelolaan Wilayah Pesisir
Terpadu dalam Mendukung Percepatan
Pelaksanaan RZWP-3-K di Provinsi
Papua Barat





Diterbitkan Oleh
Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan
Institut Pertanian Bogor
2022

Copyright © PKSPL-IPB 2022

Hak dan Ijin:

Dokumen ini dapat diproduksi ulang secara keseluruhan atau sebagian dalam bentuk apapun untuk akademik maupun organisasi nirlaba tanpa izin khusus dari pemegang hak cipta, dengan syarat menyebutkan sumbernya. Namun, PKSPL-IPB mendorong penyebaran dan penggunaan mater dalam dokumen ini. PKSPL-IPB akan menghargai menerima salinan publikasi apa pun yang menggunakan dokumen ini sebagai sumber. PKSPL-IPB sangat melarang dokumen ini untuk dijual kembali atau tujuan komersial lainnya apa pun tanpa izin tertulis sebelumnya dari pemegang hak cipta.

Penafian:

Temuan, interpretasi dan kesimpulan yang diungkapkan pada dokumen ini adalah milik tim penyusun dan tidak selalu mencerminkan pandangan dari Para Pihak pada Proyek Desain Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu dalam Mendukung Percepatan Pelaksanaan RZWP-3-K di Provinsi Papua Barat. Dokumen ini telah diproduksi oleh PKSPL-IPB dalam proyek yang didanai oleh World Bank bekerjasama dengan Kementerian BAPPENAS, ICCTF, dan COREMAP-CTI.

Penulis:

Fery Kurniawan

M. Arsyad Al Amin

Akhmad Solihin

Isdahartati

Artika Nanda Magfiroh

Desain dan Tata Letak:

Artika Nanda Magfiroh

Kutipan:

PKSPL-COREMAP. 2022. Pembelajaran Proyek Terbaik. Bogor (ID). IPB University

ISSN.....

-

Kata Pengantar

Buku ini dibuat untuk memenuhi *outcome* pada salah satu tahapan aktivitas dari keluaran dalam proyek ***Desain Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu dalam Mendukung Percepatan Pelaksanaan RZWP-3-K di Provinsi Papua Barat***. Aktivitas ini adalah menyusun pembelajaran (*lesson learned*) rehabilitasi ekosistem mangrove di Kabupaten Raja Ampat. Proyek ini didanai oleh World Bank yang bekerjasama antara Pusat Kajian sumberdaya Pesisir dan Laut (PKSPL) IPB dengan Kementerian BAPPENAS, ICCTF, dan COREMAP CTI.

Penulis dan kontributor merupakan orang-orang yang terlibat dalam survey lapang, rencana proyek, dan penyusun dokumen *outcome*, terdiri dari tim ahli ekosistem pesisir, ahli pemberdayaan masyarakat, asisten lapang, dan manajemen proyek. Semua memberikan kontribusi dalam bentuk informasi, gambar, komentar, dan hal penting lainnya. Kami sangat berterimakasih kepada masyarakat lokal Kampung Yensawai, Kepala Kampung Yensawai Barat dan Yensawai Timur, ketua adat, Koodinator BKKPN Kupang Satker Raja Ampat, Kepala BLUD Raja Ampat, dan fasilitator lokal yang telah membantu proses implementasi program rehabilitasi ekosistem mangrove di lapang hingga penyusunan buku ini.

Bogor, Maret 2022

Tim Penulis

Daftar Isi

| | |
|---|-------------------------------------|
| Kata Pengantar | vi |
| Sambutan..... | Error! Bookmark not defined. |
| Kata Pengantar | v |
| Daftar Isi..... | vi |
| Daftar Gambar | viii |
| Daftar Tabel | viii |
| 1. Pendahuluan..... | 1 |
| 2. PROFIL SINGKAT OUTPUT KEGIATAN | 4 |
| 2.1. Output 1.1 Platform tata kelola pengelolaan pesisir terpadu (ICZM) yang berisikan aturan dan prosedur dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil..... | 4 |
| 2.1.1. Keberhasilan program output 1.1 | 5 |
| 2.2. Output 1.2 Rencana teknis (protokol) dalam implementasi zonasi RZWP-3-K..... | 7 |
| 2.2.1. Keberhasilan program output 1.2 | 8 |
| 2.3. Output 1.3 Rencana teknis pemanfaatan di Kawasan Konservasi Perairan (KKP) berdasarkan daya dukung..... | 8 |
| 2.3.1. Keberhasilan program output 1.3 | 9 |
| 2.4. Output 1.4 Sistem monitoring dan evaluasi implementasi RZWP-3-K yang dibangun dan diimplementasikan..... | 9 |
| 2.4.1. Keberhasilan program output 1.4 | 10 |
| 2.5. Output 2.1 Pemangku kepentingan yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pengelolaan wilayah pesisir terpadu pada bidang tata ruang laut, pariwisata, perikanan dan/atau konservasi..... | 12 |
| 2.5.1. Keberhasilan program output 2.1 | 12 |
| 2.6. Output 3.1 Ekosistem pesisir (mangrove, lamun, dan/atau terumbu karang) yang direhabilitasi..... | 17 |
| 2.6.1. Keberhasilan program output 3.1 | 18 |
| 2.7. Output 3.2 Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui program penyadartahuan serta kegiatan publikasi dan komunikasi proyek yang dilaksanakan | 21 |
| 2.7.1. Keberhasilan program output 3.2 | 22 |
| 2.8. Output 4.1 Dukungan kegiatan monitoring, evaluasi dan pengendalian kualitas proyek..... | 24 |
| 2.9. Output 5.1 Dukungan kegiatan proyek Desain Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu dalam Mendukung Percepatan Pelaksanaan RZWP-3-K di Provinsi Papua Barat..... | 24 |
| 3. Tantangan Pelaksanaan Program | 24 |

| | |
|--|----|
| 3.1. Faktor Pembatas | 24 |
| 3.1.1. Pandemi Covid di Indonesia..... | 24 |
| 3.1.2. Pendanaan | 25 |
| 3.3. Jarak | 25 |
| 3.4. Pesimisme Masyarakat | 25 |
| 4. Pembelajaran | 28 |
| 4.1. Efektifitas pengendalian pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan laut..... | 28 |
| 4.2. Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia pemangku kepentingan dalam pengelolaan pesisir terpadu | 29 |
| 4.3. Pemulihan ekosistem kritis di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil | 31 |
| 5. Kesimpulan dan Rekomendasi | 32 |

Daftar Gambar

Gambar 1.1. Kerusakan ekosistem mangrove akibat penebangan **Error! Bookmark not defined.**

Gambar 4.2. Pengukuran pertumbuhan oleh kelompok karbon **Error! Bookmark not defined.**

Gambar 4.3. Ilustrasi ukuran bedeng tanam..... **Error! Bookmark not defined.**

Gambar 4.4. Ilustrasi konstruksi gigi hiu **Error! Bookmark not defined.**

Daftar Tabel

Tabel 2.1. Metode Penanaman Mangrove **Error! Bookmark not defined.**

Tabel 4.2. Pertambahan tinggi dan jumlah daun mangrove yang ditanam..... **Error! Bookmark not defined.**

Tabel 4.3. Tingkat kelulusan hidup rehabilitasi mangrove... **Error! Bookmark not defined.**

1. Pendahuluan

Saat ini, Indonesia sedang menggalakkan pembangunan di wilayah pesisir dan laut. Untuk menunjang program itu, dibutuhkan perencanaan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagai komponen utama dalam menentukan arah pembangunan dan jaminan investasi. Tetapi, implementasi Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP-3-K) diperkirakan akan menghadapi tantangan terjadinya tumpang tindih antara kepentingan konservasi dan kepentingan ekonomi/pemanfaatan sumberdaya yang tidak saling mendukung bahkan saling menegasikan satu sama lain. Selain itu, konflik sosial di level akar rumput juga potensial akan terjadi karena RZWP-3-K dalam proses perencanaannya masih dianggap kurang melibatkan peran masyarakat di level terendah, belum tersosialisasi, dapat membatasi akses-akses masyarakat yang telah menjadi sumber penghidupan dan aktivitas sehari-hari dan belum memiliki pedoman teknis dalam implementasinya. RZWP-3-K diharapkan mampu mewujudkan keberlanjutan pembangunan di wilayah pesisir dan laut, serta menjamin kepastian hukum dalam investasi.

Secara perspektif kewilayahan administratif, Indonesia dibagi menjadi dua struktur administratif utama, yaitu pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah daerah dibagi lagi menjadi pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota. Sesuai dengan amanat UU No 27/2007 jo No 1/2014, pengelolaan pesisir merupakan sebuah kewajiban bagi pemerintah Provinsi. Sementara itu, wilayah pesisir secara fungsional berada di konteks level masyarakat di desa/kelurahan. Dengan demikian, pengelolaan pesisir di Indonesia secara fungsional akan semakin kuat apabila pendekatan pengelolaan level masyarakat di desa/kelurahan pesisir juga dilakukan berbasis pada pengelolaan pesisir terpadu (ICM) namun lebih menekankan pada fungsi partisipatif level masyarakat di desa/kelurahan. Dan pada saat yang sama tetap menjalin kolaborasi dengan pemerintah di seluruh tingkatan, yaitu pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam konteks ini, maka pengelolaan pesisir di tingkat level masyarakat di desa/kelurahan merupakan sebuah model pengelolaan desentralisasi terendah dalam perspektif administratif namun tertinggi dalam konteks desentralisasi fungsional.

Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan, Institut Pertanian Bogor (PKSPL IPB) sebagai ICM Learning Center dan juga telah ditetapkan oleh Kementerian Riset dan Teknologi sebagai Pusat Unggulan IPTEK (PUI) Nasional dalam bidang pengelolaan pesisir terpadu (*Integrated Coastal Management*), dipercaya untuk melaksanakan proyek **Desain pengelolaan wilayah pesisir terpadu dalam mendukung percepatan pelaksanaan RZWP-3-K di Provinsi Papua Barat**, sebagai salah satu bagian dari Program dan kegiatan ***Coral reef rehabilitation and management program – coral triangle initiative (COREMAP-CTI)*** hibah dari World Bank melalui Dana Perwalian Perubahan Iklim Indonesia (*Indonesia Climate Change Trust Fund*) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Sejalan dengan tujuan proyek yakni Mendukung percepatan pelaksanaan RZWP-3-K Provinsi Papua Barat dan KKP/KKPD di Provinsi Papua Barat, pada khususnya Kabupaten Raja Ampat, maka disusunlah indikator dan target yang dibuat untuk mencapai tujuan program. Indikator/target tersebut diantaranya: (1) Efektifitas pengendalian pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan laut; (2) Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia pemangku kepentingan dalam pengelolaan pesisir terpadu; (3) Pemulihan ekosistem kritis di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan (4) Terlaksananya kegiatan dalam rencana aksi ICZM di Papua Barat. Masing-masing indicator tersebut diturunkan lagi menjadi sasaran/outcome yang dibagi menjadi output 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 3.1, 3.2, 4.1, dan 5.1.

Buku ini berisi tentang informasi umum terkait capaian yang didapatkan dari pelaksanaan kegiatan selama kurun waktu 22 bulan (Agustus 2020 – Februari 2022). Selain itu, buku ini juga berisi tentang pembelajaran-pembelajaran yang didapatkan selama proses perencanaan hingga implementasi kegiatan yang dapat digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan selanjutnya.



2. PROFIL SINGKAT OUTPUT KEGIATAN

2.1. Output 1.1 Platform tata kelola pengelolaan pesisir terpadu (ICZM) yang berisi aturan dan prosedur dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil

Platform merupakan landasan revolusi mental pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dari sektoral, konvensional, dan tidak terpadu menjadi pengelolaan berbasis management adaptive yang dilakukan secara terpadu (ICZM). Secara khusus, platform yang disusun menjadi ruang netral yang menyatukan dan mengoordinasikan para pihak terkait untuk menyelesaikan akar masalah yang menghambat keberlanjutan, mendorong kerjasama antar stakeholder dan memberikan ruang inisiatif-inisiatif baik yang telah dilakukan oleh berbagai pihak untuk dapat menghasilkan kesepakatan bersama terkait solusi sistemik dan berkelanjutan bagi pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil.

Platform tata kelola pengelolaan pesisir terpadu (ICZM) yang berisi aturan dan prosedur dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah tahapan dari Pelaksanaan Proyek Desain Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu Berbasis Kolaboratif di Era Otonomi Daerah untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan yang berlokasi di Provinsi Papua Barat.

Indikator dan target pelaksanaan output 1.1 adalah:

- Dokumen platform tata kelola pengelolaan pesisir terpadu (ICZM)
- ICZM Leader Forum di Provinsi Papua Barat
- 30 orang pemangku kepentingan mendapatkan pelatihan tentang platform tata kelola pengelolaan pesisir terpadu (ICZM)
- Satu dokumen strategi keberlanjutan ICZM



Gambar Workshop Implementasi Platform ICZM

2.1.1. Keberhasilan program output 1.1

Keberhasilan program yang dicapai pada output 1.1 dapat diketahui dari seberapa banyak indikator dan target capaian program yang terlaksana. Selama 22 bulan waktu pelaksanaan kegiatan, seluruh indikator dan capaian program dapat dilakukan dengan baik. Secara lebih jelas, keberhasilan program output 1.1 dapat diuraikan pada tabel di bawah:

| No. | Output | Indikator/target | Capaian | % Capaian |
|-----|--|--|--|-----------|
| 1.1 | Platform tata kelola pengelolaan pesisir terpadu (ICZM) yang berisi aturan dan prosedur dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. | Tersusunnya satu dokumen platform tata kelola pengelolaan pesisir terpadu (ICZM) | Telah tersedianya buku platform tata kelola pengelolaan pesisir terpadu (ICZM) | 100 |
| | | Terlaksananya satu kali ICZM <i>Leader Forum</i> di Provinsi Papua Barat | <p>Terlaksananya kegiatan ICZM Leader Forum di Manokwari. Forum ini dihadiri oleh berbagai stakeholders terkait secara online dan offline yang terdiri dari: (i) Pemerintah Daerah Papua Barat (ii) Direktorat Jenderal KSDA Kementerian BPN/Bappenas; (iii) Rektor IPB University dan kepala PKSPL LPPM IPB; (iv) UNIPA; (v) ICCTF; (vi) University of Rhode Island (vii) University Utara Malaysia (viii) Perwakilan OPD Provinsi Papua Barat; (ix) Perwakilan OPD Kabupaten Raja Ampat; dan (x) Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (PRL) KKP. Kegiatan ini bertujuan untuk:</p> <p>1. Menyamakan persepsi para leader dalam bidang pengelolaan pesisir dan laut sebagai pembuat kebijakan dan pengambil keputusan dan dapat mengaplikasikan kerangka (frame work) ICM dan membantu pemerintah daerah dalam percepatan</p> | 100 |

| No. | Output | Indikator/target | Capaian | % Capaian |
|-----|--------|--|--|------------|
| | | | <p>Implementasi pelaksanaan RZWP-3-K.</p> <p>2.Mendapatkan komitmen dari Pemerintah daerah Papua Barat untuk dapat mendukung program ICZM dalam percepatan implementasi pelaksanaan RZWP-3-K di Provinsi Papua Barat dan dimasukkan dalam RPJMD mewujudkan keberlanjutan pembangunan di wilayah pesisir dan laut Provinsi Papua Barat.</p> | |
| | | <p>Sejumlah 30 pemangku kepentingan yang mendapatkan pelatihan tentang platform tata kelola pengelolaan pesisir terpadu (ICZM)</p> | <p>Terlaksananya workshop implementasi platform ICZM di Provinsi Papua Barat. Workshop ini dihadiri oleh: (i) Instansi di Lingkup Pemerintah Provinsi Papua Barat; (ii) Instansi di Lingkup Pemerintah Kabupaten Manokwari; (iii) Instansi di Lingkup Pemerintah Kabupaten Raja Ampat; (iv) Instansi di Lingkup Pemerintah Kota Sorong; (v) Bappenas; (vi) Kementerian Kelautan Perikanan; (vii) Organisasi Kemasyarakatan, Universitas, dan Kelompok Masyarakat; dan (viii) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.</p> <p>Kegiatan ini bertujuan untuk:</p> <p>1.Menyampaikan konsep platform ICZM Provinsi Papua Barat, menyepakatinya bersama stakeholder dan mengumpulkan masukan dan informasi tambahan dari stakeholder terkait sebagai bahan</p> | <p>100</p> |

| No. | Output | Indikator/target | Capaian | % Capaian |
|-----|--------|--|--|-----------|
| | | | penyempurnaan laporan akhir platform. 2. Mensosialisasikan konsepsi platform ICZM, memberi pemahaman dan kesadaran para pemangku kepentingan tentang pengelolaan pesisir terpadu khususnya dalam implementasi platform ICZM untuk mendukung percepatan pelaksanaan RZWP-3-K di Provinsi Papua Barat. | |
| | | Tersusunnya satu dokumen strategi keberlanjutan ICZM | Telah tersusunnya dokumen strategi keberlanjutan ICZM. Penyusunan dokumen ini berkoordinasi dengan stakeholder terkait yang dapat mendukung keberlanjutan program setelah kegiatan “Desain Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu dalam Mendukung Percepatan Pelaksanaan RZWP-3-K di Provinsi Papua Barat” selesai. | 100 |

2.2. Output 1.2 Rencana teknis (protokol) dalam implementasi zonasi RZWP-3-K

Papua Barat telah memiliki RZWP-3-K yang ditetapkan oleh Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 13 Tahun 2019, hanya saja dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan dalam naskah akademik RZWP-3-K belum teridentifikasi resiko yang mungkin timbul dan cara mitigasinya. Oleh karena itu, program ini hadir untuk mengisi kekurangan dan menjadi panduan bagi pemerintah daerah dan masyarakat untuk menjalankan RZWP-3-K yang memiliki risk management. Protokol sebenarnya merupakan risk management terhadap RZWP-3-K.

Indikator dan target pelaksanaan output 1.2 adalah:

- Satu buku rencana teknis (protokol) dalam implementasi zonasi RZWP-3-K



2.2.1. Keberhasilan program output 1.2

Keberhasilan program yang dicapai pada output 1.2 dapat diketahui dari seberapa banyak indikator dan target capaian program yang terlaksana. Selama 22 bulan waktu pelaksanaan kegiatan, seluruh indikator dan capaian program dapat dilakukan dengan baik. Secara lebih jelas, keberhasilan program output 1.2 dapat diuraikan pada tabel di bawah:

| No. | Output | Indikator/target | Capaian | % Capaian |
|-----|---|--|---|-----------|
| 1.2 | Rencana teknis (protokol) dalam implementasi zonasi RZWP-3-K. | Tersedianya satu buku rencana teknis (protokol) dalam implementasi zonasi RZWP-3-K | Tersedianya draft buku rencana teknis (protokol) dalam implementasi zonasi RZWP-3-K | 70 |

2.3. Output 1.3 Rencana teknis pemanfaatan di Kawasan Konservasi Perairan (KKP) berdasarkan daya dukung

Rencana teknis dalam implementasi RZWP-3-K khususnya di kawasan konservasi dimaksudkan untuk memberikan panduan kepada pemerintah daerah dan pengelola kawasan konservasi perairan untuk dapat memastikan alokasi ruang yang presisi. Dengan adanya hal tersebut dihitunglah daya dukung dan daya tampung pada masing-masing zona, sehingga akan terlihat jumlah unit kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan konservasi tersebut yang disertai dengan prosedur standar (SOP) untuk menjalankan kegiatan pemanfaatan ruang yang ada.

Indikator dan target pelaksanaan output 1.3 adalah:

- Tersedianya satu buku rencana teknis wisata dan perikanan (penangkapan dan budidaya laut) di Kawasan Konservasi Perairan (KKP) berdasarkan daya dukung.
- SOP wisata, penangkapan dan budidaya laut yang minimal ditetapkan oleh Kepala Pengelola KKP.



2.3.1. Keberhasilan program output 1.3

Keberhasilan program yang dicapai pada output 1.3 dapat diketahui dari seberapa banyak indikator dan target capaian program yang terlaksana. Selama 22 bulan waktu pelaksanaan kegiatan, seluruh indikator dan capaian program dapat dilakukan dengan baik. Secara lebih jelas, keberhasilan program output 1.3 dapat diuraikan pada tabel di bawah:

| No. | Output | Indikator/target | Capaian | % Capaian |
|-----|---|--|---|-----------|
| 1.3 | Rencana teknis pemanfaatan di Kawasan Konservasi Perairan (KKP) berdasarkan daya dukung | Tersedianya satu buku rencana teknis wisata dan perikanan (penangkapan dan budidaya laut) di Kawasan Konservasi Perairan (KKP) berdasarkan daya dukung | Sudah tersedianya draft buku rencana teknis pemanfaatan di Kawasan Konservasi Perairan (KKP) berdasarkan daya dukung | 85 |
| | | SOP wisata, penangkapan dan budidaya laut yang minimal ditetapkan oleh Kepala Pengelola KKP | Sudah ada bahasan terkait pembuatan SOP wisata, penangkapan dan budidaya laut yang minimal ditetapkan oleh Kepala Pengelola KKP | 40 |

2.4. Output 1.4 Sistem monitoring dan evaluasi implementasi RZWP-3-K yang dibangun dan diimplementasikan

Karena RZWP-3-K merupakan proses manajemen mulai dari perencanaan hingga monitoring, maka diperlukan instrumen wajib yang harus disediakan pemerintah daerah untuk mengontrol setiap kegiatan yang telah dijalankan dalam mengawal implementasi RZWP-3-K. Sistem monitoring dan evaluasi implementasi RZWP-3-K yang dibangun dan

diimplementasikan merupakan merupakan inovasi yang menyediakan sarana untuk publik secara luas agar dapat terlibat dalam mengontrol dan mengevaluasi pelaksanaan RZWP-3-K khususnya dalam memastikan tidak adanya pelanggaran dalam hal penempatan kegiatan sesuai zonasi dan pelanggaran-pelanggaran lainnya yang dapat mengancam kelestarian wilayah pesisir dan laut.

Sistem monitoring dan evaluasi implementasi RZWP-3-K bersifat sangat dinamis yang dapat diupdate setiap saat karena adanya input dari masyarakat secara luas dimanapun dan kapanpun. Sistem ini akan diberikan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat untuk memudahkan proses monitoring dan evaluasi terhadap implementasi RZWP-3-K sehingga dapat dijalankan secara efektif dan efisien.

Indikator dan target pelaksanaan output 1.4 adalah:

- Sistem monitoring dan evaluasi implementasi RZWP-3-K.
- Pedoman monitoring dan evaluasi implementasi RZWP-3-K.
- 50 orang (Staff daerah/staff pusat) mendapatkan pengetahuan dan keterampilan mengoperasikan sistem dan pedoman monitoring dan evaluasi implementasi RZWP-3-K.
- Diseminasi sistem monitoring dan evaluasi implementasi RZWP-3-K dan 45 orang terlatih dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan RZWP-3-K.
- Uji coba dan pendampingan implementasi sistem monitoring dan evaluasi dan implementasi RZWP-3-K.
- Buku lesson learned implementasi sistem monitoring dan evaluasi dan implementasi RZWP-3-K.



2.4.1. Keberhasilan program output 1.4

Keberhasilan program yang dicapai pada output 1.4 dapat diketahui dari seberapa banyak indikator dan target capaian program yang terlaksana. Selama 22 bulan waktu pelaksanaan kegiatan, seluruh indikator dan capaian program dapat dilakukan dengan baik. Secara lebih jelas, keberhasilan program output 1.4 dapat diuraikan pada tabel di bawah:

| No. | Output | Indikator/target | Capaian | % Capaian |
|-----|--|---|--|-----------|
| 1.4 | Sistem monitoring dan evaluasi implementasi RZWP-3-K yang dibangun dan diimplementasikan | Satu sistem monitoring dan evaluasi implementasi RZWP-3-K | Telah tersedianya sistem monitoring dan evaluasi implementasi RZWP-3-K website atau aplikasi yang dapat diakses pada: https://simona.pksplipb.or.id/ dan diunduh pada play store dengan nama aplikasi SIMONA. | 100 |
| | | Satu pedoman monitoring dan evaluasi implementasi RZWP-3-K | Telah tersedianya pedoman monitoring dan evaluasi implementasi RZWP-3-K | 100 |
| | | Lima puluh orang (Staff daerah/staff pusat) yang mendapatkan pengetahuan dan keterampilan mengoperasikan sistem dan pedoman monitoring dan evaluasi implementasi RZWP-3-K | Adanya dokumentasi dan laporan kegiatan workshop pembuatan sistem dan pedoman monitoring dan evaluasi implementasi RZWP-3-K | 70 |
| | | Terlaksananya diseminasi sistem monitoring dan evaluasi implementasi RZWP-3-K dan empat puluh lima orang terlatih dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan RZWP-3-K | Tersedianya dokumentasi dan laporan kegiatan diseminasi dan pelatihan sistem monitoring dan evaluasi implementasi RZWP-3-K | 70 |
| | | Terlaksananya uji coba dan pendampingan implementasi sistem monitoring dan evaluasi dan implementasi RZWP-3-K | Adanya dokumentasi dan laporan kegiatan uji coba dan pendampingan implementasi sistem monitoring dan evaluasi dan implementasi RZWP-3-K | 70 |

| No. | Output | Indikator/target | Capaian | % Capaian |
|-----|--------|---|--|-----------|
| | | Tersusunnya satu buku leasson learned implementasi sistem monitoring dan evaluasi dan implementasi RZWP-3-K | Sudah adanya bahasan terkait penyusunan buku leasson learned implementasi sistem monitoring dan evaluasi dan implementasi RZWP-3-K | 40 |

2.5. Output 2.1 Pemangku kepentingan yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pengelolaan wilayah pesisir terpadu pada bidang tata ruang laut, pariwisata, perikanan dan/atau konservasi

Implementasi RZWP-3-K memerlukan pemahaman mendalam para pemangku kepentingan, baik itu pemerintah maupun masyarakat. Tanpa pemahaman yang tepat, implementasi RZWP-3-K di Provinsi Papua Barat tidak dapat berjalan dengan optimal. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan kapasitas para pemangku kepentingan dalam pengelolaan wilayah pesisir terpadu pada bidang tata ruang laut, pariwisata, perikanan dan/atau konservasi. Naiknya kapasitas dalam pengelolaan wilayah pesisir terpadu akan memudahkan Provinsi Papua Barat dalam melakukan percepatan implementasi RZWP-3-K.

Indikator dan target pelaksanaan output 2.1 adalah:

- Tiga puluh orang (staff daerah/staff pusat) mendapatkan pelatihan SIG dan tata ruang pesisir (coastal zone planning) dengan peningkatan kemampuan 75%.
- Empat orang mengikuti workshop/pelatihan/seminar internasional terkait ICZM, coastal spatial planning, konservasi, dan/atau terkait lainnya.
- Tiga puluh orang pemangku kepentingan (staff daerah/staff pusat) mengikuti pelatihan dan workshop ICZM.
- Dua puluh fasilitator (staff daerah/staf pusat) mengikuti training of trainer (TOT) dan training workshop fasilitator ICZM di Jakarta.
- Tiga puluh lima masyarakat lokal mengikuti pelatihan ICZM untuk masyarakat lokal.
- Dua workshop tentang pengelolaan perikanan sebagai bagian dari pengelolaan zona pesisir terpadu.
- Dua puluh orang staff nasional dan subnasional mengikuti pelatihan/kursus singkat tentang bioekonomi analysis untuk meningkatkan praktek pengelolaan perikanan.

2.5.1. Keberhasilan program output 2.1

Keberhasilan program yang dicapai pada output 2.1 dapat diketahui dari seberapa banyak indikator dan target capaian program yang terlaksana. Selama 22 bulan waktu pelaksanaan kegiatan, seluruh indikator dan capaian program dapat dilakukan dengan baik. Secara lebih jelas, keberhasilan program output 2.1 dapat diuraikan pada tabel di bawah:

| No. | Output | Indikator/target | Capaian | % Capaian |
|-----|---|---|--|-----------|
| 2.1 | Pemangku kepentingan yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pengelolaan wilayah pesisir terpadu pada bidang tata ruang laut, pariwisata, perikanan dan/atau konservasi. | Tiga puluh orang (staff daerah/staff pusat) mendapatkan pelatihan SIG dan tata ruang pesisir (coastal zone planning) dengan peningkatan kemampuan 75% | Terlaksananaya kegiatan pelatihan SIG dan tata ruang pesisir (coastal zone planning) di Manokwari. Acara tersebut dihadiri hybrid oleh 47 yang melibupti 31 peserta offline dasn 16 peserta online. Peserta berasal dari berbagai instansi pemerintah baik di lingkup kabupaten maupun provinsi di Papua Barat. Capaian peningkatan kemampuan peserta pelatihan adalah 80%. | 100 |
| | | Minimal empat orang mengikuti workshop/pelatihan/seminar internasional terkait ICZM, coastal spatial planning, konservasi, dan/atau terkait lainnya | 3 orang peserta mengikuti pelatihan ICM and MSP: Moving Beyond Planning for Sustainable Development of Coastal and Marine Areas in the East Asian Region oleh Fujian Institute for Sustainable Oceans (Xiamen University) Partnerships in Environmental Management for the Seas of East Asia (PEMSEA) secara online pada tanggal 14 – 17 September 2021 Peserta berasal dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Barat, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB, dan Pusat Kajian | 100 |

| No. | Output | Indikator/target | Capaian | % Capaian |
|-----|--------|--|---|-----------|
| | | | <p>Sumberdaya Pesisir dan Lautan IPB.</p> <p>4 orang peserta mengikuti International Conference on Integrated Coastal Management and Marine Biotechnology secara online pada tanggal 11-12 Agustus 2021. Pada kegiatan conference ini peserta yang ikut sebagai pemakalah sebanyak 4 (empat) orang terdiri dari PKSPL IPB dan Tenaga Ahli Proyek paket 4 COREMAP CTI.</p> | |
| | | Tiga puluh orang pemangku kepentingan (staff daerah/staff pusat) mengikuti pelatihan dan workshop ICZM | <p>Terlaksananya kegiatan training dan workshop ICZM Provinsi Papua Barat. Pelatihan diikuti oleh perwakilan dari para pemangku kepentingan yang berasal dari pemerintah pusat dan organisasi pemerintah daerah (OPD) Provinsi Papua Barat dan Kabupaten Raja Ampat serta NGO/LSM dengan total peserta sebanyak 30 orang.</p> | 100 |
| | | Dua puluh fasilitator (staff daerah/satf pusat) mengikuti training of trainer (TOT) dan training workshop fasiltator ICZM di Jakarta | <p>Terlaksananya kegiatan (TOT) dan training workshop fasiltator ICZM di Bali. Peserta kegiatan ini merupakan champion terpilih middle manager dari Dinas perikanan dan kelautan Provinsi : Papua, Papua Barat,</p> | 100 |

| No. | Output | Indikator/target | Capaian | % Capaian |
|-----|--------|--|---|-----------|
| | | | Maluku, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Jawa Timur, Jawa Barat, Banten, DKI Jakarta, Lampung, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Bali dan Bappeda Kabupaten Raja Ampat. | |
| | | Tiga puluh lima masyarakat lokal mengikuti pelatihan ICZM untuk masyarakat lokal | Terlaksananya pelatihan ICZM untuk masyarakat lokal yang dilaksanakan di Waisai, Raja Ampat. Peserta kegiatan ini berasal dari kampung Yensawai, Arborek, Friwen, Yenbuba, Spokren, Saukabu, dan Saonek wilayah Raja Ampat. | 100 |
| | | Dua workshop tentang pengelolaan perikanan sebagai bagian dari pengelolaan zona pesisir terpadu terlaksana | Terlaksananya kegiatan workshop pengelolaan perikanan dengan pendekatan bioekonomi yang dilaksanakan secara hybrid. Workshop ini dihadiri oleh berbagai stakeholders terkait secara online dan offline yang terdiri dari : (i) Pemerintah Daerah Papua Barat; (ii) Direktorat Jendal KSDA Kementerian BPN/Bappenas; (iii) IPB University yaitu Rektor IPB dan kepala PKSPL LPPM IPB dan para peneliti; (iv) UNIPA; (v) Direktur Excutive ICCF dan | 100 |

| No. | Output | Indikator/target | Capaian | % Capaian |
|-----|--------|--|---|-----------|
| | | | stafnya; (vi) Project ICM PKSPL beserta Tim; (vii) University of Rhode Island; (viii) University Utara Malaysia; (ix) Perwakilan OPD Provinsi Papua Barat; (x) Perwakilan OPD Kabupaten Raja Ampat; dan (xi) Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (PRL) KKP. Adapun jumlah peserta pada workshop ini sebanyak 53 orang yang terdiri dari 29 peserta laki-laki dan 24 orang peserta perempuan. | |
| | | Dua puluh orang staff nasional dan subnasional mengikuti Pelatihan/kursus singkat tentang bioekonomi analisis untuk meningkatkan praktek pengelolaan perikanan | Terlaksananya kegiatan pelatihan bioekonomi untuk praktek pengelolaan perikanan yang dilakukan sebanyak 3 sesi. Peserta pelatihan berasal dari: (i) Direktorat Kelautan dan Perikanan, Bappenas, (ii) Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan, (iii) Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, (iv) Pusat Riset Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, (v) ICCTF, dan (vi) Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, IPB | 100 |

| No. | Output | Indikator/target | Capaian | % Capaian |
|-----|--------|------------------|--|-----------|
| | | | University. Adapun jumlah peserta pada workshop ini sebanyak 37 orang. | |

2.6. Output 3.1 Ekosistem pesisir (mangrove, lamun, dan/atau terumbu karang) yang direhabilitasi

Ancaman terhadap kerusakan ekosistem pesisir (ekosistem lamun, mangrove dan terumbu karang) semakin meningkat seiring dengan peningkatan aktivitas manusia. Selain itu, fenomena abrasi, tenggelamnya pulau, dan pemutihan karang (coral bleaching) menambah kebutuhan untuk dilakukannya rehabilitasi ekosistem kritis di wilayah pesisir untuk tujuan pemulihan dan perlindungan pulau. Apalagi akhir-akhir ini dampak perubahan iklim semakin membuat tingkat ancaman semakin tinggi. Oleh karena itu, diperlukan tindakan mitigasi untuk ancaman tersebut. Kampung Yensawai, kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat merupakan salah satu lokasi yang terdampak dari fenomena diatas. Sehingga dipilih menjadi lokasi uji coba rehabilitasi ekosistem kritis.

Indikator dan target pelaksanaan output 3.1 adalah:

- Dokumen studi mendalam penilaian kondisi ekosistem kritis dan metode rehabilitasi
- Tiga kelompok konservasi dan rehabilitasi ekosistem kritis di masyarakat terbentuk
- Seribu enam ratus bibit dalam seratus meter persegi (ekuivalen) luasan wilayah ekosistem terumbu karang terehabilitasi
- Lima ribu bibit dalam satu hektar (ekuivalen) luasan wilayah ekosistem ekosistem mangrove terehabilitasi
- Lima ratus rumpun bibit dalam lima ratus meter persegi (ekuivalen) wilayah ekosistem lamun terehabilitasi
- Dokumen laporan kegiatan pengawasan dan pemeliharann kawasan rehabilitasi
- Buku leasson learned program rehabilitasi ekosistem kritis



2.6.1. Keberhasilan program output 3.1

Keberhasilan program yang dicapai pada output 3.1 dapat diketahui dari seberapa banyak indikator dan target capaian program yang terlaksana. Selama 22 bulan waktu pelaksanaan kegiatan, seluruh indikator dan capaian program dapat dilakukan dengan baik. Secara lebih jelas, keberhasilan program output 3.1 dapat diuraikan pada tabel di bawah:

| No. | Output | Indikator/target | Capaian | % Capaian |
|-----|--|--|---|-----------|
| 3.1 | Ekosistem pesisir (mangrove, lamun, dan/atau terumbu karang) yang direhabilitasi | Satu dokumen studi mendalam penilaian kondisi ekosistem kritis dan metode rehabilitasi | Telah tersedianya laporan hasil studi mendalam penilaian kondisi ekosistem kritis dan metode rehabilitasi | 100 |
| | | Tiga kelompok konservasi dan rehabilitasi ekosistem kritis di masyarakat terbentuk | Adanya surat keputusan kelompok masyarakat pelaksana konservasi dan rehabilitasi ekosistem kritis dan terlaksananya kegiatan penguatan kelembagaan yang menghasilkan peraturan kampung Bersama antara Kampung Yensawai Timur. | 100 |

| No. | Output | Indikator/target | Capaian | % Capaian |
|-----|--------|--|--|-----------|
| | | Seribu enam ratus bibit dalam seratus meter persegi (ekuivalen) luasan wilayah ekosistem terumbu karang terehabilitasi | Terlaksananya dan terlaporkannya kegiatan rehabilitasi lamun, mangrove dan terumbu karang di Yensawai Barat. Pada kegiatan rehabilitasi tersebut dilakukan penanaman 7.530 propagul mangrove, 1521 rumpun bibit lamun dan 1.650 fragmen karang. Penanaman tersebut melebihi target awal rehabilitasi yakni penanaman 1.600 fragmen terumbu karang terehabilitasi, 5.000 propagul mangrove terehabilitasi dan 500 bibit lamun terehabilitasi. | 100 |
| | | Lima ribu bibit dalam satu hektar (ekuivalen) luasan wilayah ekosistem mangrove terehabilitasi | Terlaksananya dan terlaporkannya kegiatan rehabilitasi lamun, mangrove dan terumbu karang di Yensawai Barat. Pada kegiatan rehabilitasi tersebut dilakukan penanaman 7.530 propagul mangrove, 1521 rumpun bibit lamun dan 1.650 fragmen karang. Penanaman tersebut melebihi target awal rehabilitasi yakni penanaman 1.600 fragmen terumbu karang terehabilitasi, 5.000 propagul mangrove | 100 |

| No. | Output | Indikator/target | Capaian | % Capaian |
|-----|--------|--|--|-----------|
| | | | <p>terehabilitasi dan 500 bibit lamun terahabilitasi. Luasan rehabilitasi ekosistem pesisir yang berhasil dicapai adalah 100 m² (ekuivalen) luasan wilayah ekosistem terumbu karang terahabilitasi. 1.000 m² (ekuivalen) luasan wilayah ekosistem mangrove terahabilitasi dan 500 m² (ekuivalen) wilayah ekosistem lamun terahabilitasi.</p> | |
| | | <p>Lima ratus rumpun bibit dalam lima ratus meter persegi (ekuivalen) wilayah ekosistem lamun terahabilitasi</p> | <p>Terlaksananya dan dilaporkan kegiatan rehabilitasi lamun, mangrove dan terumbu karang di Yensawai Barat. Pada kegiatan rehabilitasi tersebut dilakukan penanaman 7.530 propagul mangrove, 1521 rumpun bibit lamun dan 1.650 fragmen karang. Penanaman tersebut melebihi target awal rehabilitasi yakni penanaman 1.600 fragmen terumbu karang terahabilitasi, 5.000 propagul mangrove terahabilitasi dan 500 bibit lamun terahabilitasi. Luasan rehabilitasi ekosistem pesisir yang berhasil dicapai adalah 100 m²</p> | 100 |

| No. | Output | Indikator/target | Capaian | % Capaian |
|-----|--------|--|--|-----------|
| | | | (ekuivalen) luasan wilayah ekosistem terumbu karang ter rehabilitasi. 1.000 m2 (ekuivalen) luasan wilayah ekosistem mangrove ter rehabilitasi dan 500 m2 (ekuivalen) wilayah ekosistem lamun ter rehabilitasi. | |
| | | Satu dokumen laporan kegiatan pengawasan dan pemeliharaan kawasan rehabilitasi | Adanya dokumentasi dan laporan hasil pengawasan dan pemeliharaan kawasan rehabilitasi. | 100 |
| | | Satu buku leasson learned program rehabilitasi ekosistem kritis tersusun | Telah tersedianya draft buku leasson learned program rehabilitasi ekosistem kritis. | 100 |

2.7. Output 3.2 Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui program penyadartahuan serta kegiatan publikasi dan komunikasi proyek yang dilaksanakan

Keberhasilan dan kesuksesann program yuang dilaksankan tidak akan berarti jika tidak banyak masyarakat yan mengetui untuk kemudian menimbulkan semangat bersama dalam mewujudkan percepatan implementasi RZWP-3-K di Provinsi Papua Barat. Dengan adanya hal tersebut, perlu adanya sosialisasi program yang telah dilakukan oleh PKSPL IPB baik di lapangan maupun saat melakukan diskusidengan stakeholder terkait sehingga program bisa diketahui oleh masyarakat secara luas.

Indikator dan target pelaksanaan output 3.2 adalah:

- Dua ribu lima ratus masyarakat yang terpapar informasi dari kegiatan kampanye publik tentang konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan sumberdaya pesisirdan lautan
- Dua ratus empat puluh orang terlibat dalam aksi bersih pantai
- Dua kali media trip dilaksanakan dengan publikasi di media
- Tersedianya material komunikasi dan publikasi proyek

2.7.1. Keberhasilan program output 3.2

Keberhasilan program yang dicapai pada output 3.2 dapat diketahui dari seberapa banyak indikator dan target capaian program yang terlaksana. Selama 22 bulan waktu pelaksanaan kegiatan, seluruh indikator dan capaian program dapat dilakukan dengan baik. Secara lebih jelas, keberhasilan program output 3.2 dapat diuraikan pada tabel di bawah:

| No. | Output | Indikator/target | Capaian | % Capaian |
|-----|---|--|---|-----------|
| 3.2 | Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui program penyadartahuan serta kegiatan publikasi dan komunikasi proyek yang dilaksanakan | Dua ribu lima ratus masyarakat yang terpapar informasi dari kegiatan kampanye publik tentang konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan sumberdaya pesisirdan lautan | 11.590 masyarakat di Provinsi Papua Barat terpapar informasi dari kegiatan kampanye publik tentang konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan sumberdaya pesisirdan lautan . Masyarakat terpapar dari IPB TV, Indosiar, Green Indonesia, Tribun News, Detik.com, Teropong News, Radar Sorong, Diskominfo Raja Ampat, AIWA TV, Kodim Raja Ampat, mns.com dan media masa lain. | 100 |
| | | Dua ratus empat puluh orang terlibat dalam aksi bersih pantai | Sebanyak 200 orang mengikuti kegiatan aksi bersih pantai selama 4 (empat) hari pada tanggal 19-23 Maret 2022 yang bertempat di Pulau Mansinam dengan beberapa rangkaian kegiatan lainnya. Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan dari para pemangku kepentingan yang berasal dari pemerintah pusat dan organisasi pemerintah daerah (OPD) Provinsi Papua Barat dan Kabupaten Manokwari serta NGO/LSM. Sebanyak 240 orang mengikuti kegiatan aksi | 100 |

| No. | Output | Indikator/target | Capaian | % Capaian |
|-----|--------|--|---|-----------|
| | | | bersih pantai selama 7(tujuh) hari pada tanggal 6-13 Februari 2022 yang bertempat di Raja Ampat dengan beberapa rangkaian kegiatan lainnya. Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan dari para pemangku kepentingan yang berasal dari pemerintah pusat dan organisasi pemerintah daerah (OPD) Provinsi Papua Barat dan Kabupaten Manokwari serta NGO/LSM. | |
| | | Adanya dua kali media trip yang dilaksanakan dengan publikasi di media | Terlaksananya kegiatan media trip pada tanggal 6-13 Februari 2022 yang dilakukan dengan mengajak media lokal dan nasional untuk melihat langsung apa yang sudah, sedang dan akan dilakukan oleh program Bappenas – ICCTF bersama PKSPL IPB dengan Pemda Papua Barat dan Pemda Kabupaten Raja Ampat. Kunjungan media dibuat dengan cara yang natural, apa adanya dan semua tim berbaur. Awak media diberi kesempatan untuk bertanya sebeb-as-bebasnya kepada narasumber dari PKSPL IPB tentang program. Peserta kegiatan media trip ini dari Bappenas, Pemda Kabupaten Raja Ampat, ICCTF, PKSPL, TV Nasional, koran/majalah Tempo (nasional), koran kompas (nasional), | 100 |

| No. | Output | Indikator/target | Capaian | % Capaian |
|-----|--------|--|--|-----------|
| | | | koran republika (nasional), Detil.com (media umum), Green Indonesia (media lingkungan), IPB Today (nasional), Papua Pos (koran Provinsi), tokoh masyarakat, mitra lain di Raja Ampat dan masyarakat. | |
| | | Tersedianya material komunikasi dan publikasi proyek | Tersedianya multimedia dan material cetak terkait proyek yang mendukung pelaksanaan proyek. | 100 |

2.8. Output 4.1 Dukungan kegiatan monitoring, evaluasi dan pengendalian kualitas proyek

Output ini adalah output pendukung.

2.9. Output 5.1 Dukungan kegiatan proyek Desain Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu dalam Mendukung Percepatan Pelaksanaan RZWP-3-K di Provinsi Papua Barat

Output ini adalah output pendukung.

3. Tantangan Pelaksanaan Program

3.1. Faktor Pembatas

3.1.1. Pandemi Covid di Indonesia

Covid-19 atau yang lebih dikenal sebagai Virus Corona telah menjadi perhatian publik sejak kemunculannya terdeteksi di Tiongkok untuk kali pertama di awal tahun 2020. Meninggalnya ribuan jiwa akibat virus ini membuatnya menjadi pusat perhatian banyak negara, termasuk Indonesia. Pandemi COVID-19 terbukti telah memberikan tekanan pada kondisi ekonomi dan sosial di Indonesia sejak akhir tahun 2019. Dampak ekonomi ini berdampak luas di seluruh wilayah Indonesia. Perekonomian masing-masing daerah terancam, ditambah dengan kondisi daerah yang lebih buruk dari sebelumnya. Karena hal tersebut, pemerintah Indonesia langsung mengambil langkah agresif agar angka penyebaran bisa ditekan semaksimal mungkin.

Indonesia lebih memilih pembatasan sosial (social distancing) sebagai solusi daripada melakukan lockdown yaitu mengunci akses masuk dan keluar wilayah bagi siapapun untuk

mencegah penyebaran virus yang umumnya digunakan oleh kebanyakan negara. Inti dari pembatasan sosial adalah menjauhi diri dari aktivitas sosial secara langsung dengan orang lain, sedangkan lockdown berarti suatu wilayah akan diisolasi dan terjadi pemberhentian total semua aktivitas di wilayah tersebut. Alasan fundamental kenapa Indonesia lebih memilih memberlakukan pembatasan sosial adalah banyak masyarakat Indonesia yang mengandalkan upah harian, jadi akan rawan mereka tidak bisa mencari mata pencaharian apabila lockdown diberlakukan. Menjaga jarak sosial setidaknya memberlakukan beberapa himbauan kepada seluruh warga negara, diantaranya adalah bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan beribadah di rumah.

Dampak Covid-19 di Indonesia ini tentunya sangat berdampak terhadap pelaksanaan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan yang dimulai dari Bulan Agustus 2020 hingga Februari 2022 yang bersamaan dengan pandemic yang melanda di Indonesia mengakibatkan banyak kegiatan program yang mesti disesuaikan dengan kebijakan pemerintah. Mulai dari pembatasan wilayah, kebijakan WFH (work from home), pengunduran jadwal pelaksanaan kegiatan karena jumlah masyarakat yang terpapar Covid-19 meningkat drastis, hingga tim yang terpapar Covid-19 yang mengakibatkan pelaksanaan kegiatan kurang berjalan dengan baik menjadi salah satu faktor pembatas pelaksanaan program.

3.1.2. Pendanaan

Pada dasarnya pendanaan memiliki pengaruh yang besar terhadap keberlangsungan kegiatan. Pendanaan yang lancar akan memperlancar pelaksanaan, tetapi yang tidak akan sebaliknya. Pengelolaan dana yang baik akan membawa kebaikan juga baik untuk masyarakat ataupun untuk keberlanjutan kegiatan. Beberapa kali pelaksanaan kegiatan terpaksa ditunda dikarenakan permasalahan dana seperti dana belum cair.

3.3. Jarak

Lokasi pelaksanaan program yang sebagian besar dilakukan di Provinsi Papua Barat sedangkan kantor PKSPL IPB yang berada di Bogor juga merupakan suatu tantangan tersendiri. Harus adanya komunikasi yang intens dilakukan supaya koordinasi antar stakeholder (Pemerintah Daerah, dan masyarakat lokal) dapat berjalan dengan baik. Beberapa kali ditemukan pelaksanaan kegiatan kurang optimal karena kurangnya koordinasi yang baik antara tim di Bogor dan stakeholder terkait di Provinsi Papua Barat. Perbedaan persepsi juga kerap ditemukan jika komunikasi antara tim di Bogor dan stakeholder terkait di Provinsi Papua Barat tidak dilakukan secara baik.

3.4. Pesimisme Masyarakat

Salah satu kegiatan yang dilaksanakan adalah rehabilitasi ekosistem kritis yang melibatkan masyarakat lokal di Raja Ampat, khususnya Kampung Yensawai. Kegiatan rehabilitasi berbasis masyarakat membutuhkan kerjasama yang baik antara akademisi sebagai mitra dengan masyarakat sebagai penerima manfaat. Sebelum melakukan kegiatan rehabilitasi, hal yang dilakukan oleh akademisi yaitu melakukan pemilihan lokasi. Salah satu pertimbangan dalam pemilihan lokasi yaitu sosial budaya. Kondisi sosial budaya

masyarakat yang kooperatif akan membuat kegiatan rehabilitasi menjadi efektif dan efisien, begitu pula sebaliknya, apabila masyarakat di lokasi tersebut kurang kooperatif maka akan menghambat kegiatan tersebut. Pasca kegiatan penanaman akan ada kegiatan berupa perawatan, yang membutuhkan perhatian lebih dari masyarakat sekitarnya. Tak hanya masyarakat tetapi LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) juga dapat mempengaruhi kesuksesan kegiatan. LSM yang baik dan tulus mendampingi masyarakat binaannya baik dari segi ilmu maupun pendanaan akan membuahkan hasil yang maksimal untuk sebuah kegiatan rehabilitasi.

Kondisi sosial budaya masyarakat Kampung Yensawai, Raja Ampat tergolong memadai. Hal tersebut dilihat dari penerimaan masyarakat terhadap kedatangan akademisi sampai hal yang dibawa oleh akademisi dari IPB University yaitu kegiatan rehabilitasi. Masyarakat Kampung Yensawai dengan semangat mendengarkan dan mempraktikkan materi tentang manfaat mangrove hingga bagaimana cara menanam dan merawatnya. Sikap yang ditampilkan masyarakat Kampung Yensawai membuat kegiatan rehabilitasi berjalan lancar dan tentunya diharapkan juga memiliki keberlanjutan.



Glasses

Dego Dego

ICCTF

KEPANTUN-TUGU-MALIOBORO-TAMAN SARI-POJOK BETENG-KOTA
JOGJA
JOGJA
JOGJA
JOGJA
KEPANTUN-TUGU-MALIOBORO-TAMAN SARI-POJOK BETENG-KOTA

4. Pembelajaran

4.1. Efektifitas pengendalian pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan laut

Indikator saran/outcome dari efektifitas pengendalian pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan laut adalah peningkatan efektifitas pengendalian pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan laut yang meliputi:

- 1.1. Tersusunnya satu platform tata kelola pengelolaan pesisir terpadu (ICZM) yang berisi aturan dan prosedur dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi Papua Barat (output 1.1).
- 1.2. Tersusunnya satu rencana teknis (protokol) dalam implementasi zonasi RZWP-3-K (output 1.2).
- 1.3. Tersusunnya satu rencana teknis pemanfaatan di Kawasan Konservasi Perairan (KKP) berdasarkan daya dukung (output 1.3).
- 1.4. Terbangun dan terimplementasikannya satu sistem monitoring dan evaluasi implementasi RZWP-3-K, serta satu manual guidance (output 1.4).

Pelaksanaan kegiatan dari masing-masing sasaran/outcome ini memiliki pembelajaran tersendiri yang kemudian dapat dijadikan acuan untuk pelaksanaan kegiatan selanjutnya. Pembelajaran ini didapatkan dari proses persiapan, pelaksanaan, hingga pelaporan suatu kegiatan. Pembelajaran dari sasaran peningkatan efektifitas pengendalian pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan laut adalah sebagai berikut:

- Provinsi Papua Barat telah memiliki dasar dan landasan yang berbasis *scientific* untuk menjalankan pengelolaan wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecilnya secara berkelanjutan yang didasari pengelolaan terpadu, Hal ini sangat mendukung visi Provinsi Papua Barat sebagai Provinsi Berkelanjutan (Provinsi Konservasi).
- Platform merupakan suatu inovasi dan pembelajaran karena belum ada platform ICM yang diterapkan di Indonesia.
- Peran stakeholder dan semua komponen masyarakat khususnya masyarakat pesisir masih harus ditingkatkan dalam hal partisipasi, memberikan input, dan melakukan kontrol terhadap pembangunan di wilayah pesisir.
- Meskipun platform ini bukan merupakan dokumen wajib, tetapi sangat penting untuk mengarahkan pelaksanaan pengelolaan pesisir terpadu termasuk mendukung implementasi RZWP-3-K.
- Dokumen rencana teknis protokol implementasi RZWP-3-K berisi instrumen pengelolaan berupa perencanaan pembangunan daerah, perencanaan tata ruang pesisir, mekanisme pemantauan dan evaluasi tata ruang pesisir.

- Pengelolaan informasi diperlukan dalam penyusunan dokumen teknis protokol implementasi RZWP-3-K sehingga dokumen yang disusun sesuai dengan kebutuhan daerah.
- Metode yang digunakan dalam penyusunan dokumen protokol ini adalah dengan studi literatur, dan analisis peran dan fungsi pemerintah pusat dan daerah. Dengan adanya hal tersebut, diperlukan pendampingan berkelanjutan.
- BKKPN UPT Kupang Satker Raja Ampat menyambut baik adanya kegiatan pembuatan dokumen rencana teknis ini karena membantu kinerja dan pelengkapan dokumen milik BKKPN UPT Kupang Satker Raja Ampat. Hal ini karena dokumen daya dukung milik BKKPN baru sampai Rencana Pengelolaan dan Zonasi (RPZ) dan belum detail. Dokumen rencana teknis merupakan turunan dari dokumen RPZ.
- Kegiatan pengambilan data survei dilapang harus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Pihak terkait tersebut seperti dinas pemerintahan, kepala desa, kepala adat dan tokoh masyarakat lainnya. Hal ini bertujuan sebagai kegiatan minta izin (ketuk pintu) agar kegiatan diketahui oleh masyarakat, sehingga masyarakat tidak curiga dan keamanan dan kenyamanan tim survei bisa terjaga.
- Monitoring dan Evaluasi (Monev) Implementasi RZWP-3-K Provinsi Papua Barat yang dibangun dan diimplementasikan memungkinkan setiap orang dan lembaga untuk dapat berpartisipasi dalam proses monitoring dan evaluasi RZWP-3-K.
- Sistem Monitoring dan Evaluasi Implementasi RZWP-3-K di Provinsi Papua Barat akan berjalan dengan efektif apabila Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat memiliki super admin dan admin yang kompatibel untuk mendukung sistem berjalan dengan efektif.
- Sistem Monitoring dan Evaluasi Implementasi RZWP-3-K di Provinsi Papua dapat diunduh pada play store dengan nama aplikasi simona yang dapat diakses dengan download simona pada google play untuk pengguna android.

4.2. Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia pemangku kepentingan dalam pengelolaan pesisir terpadu

Indikator saran/outcome dari peningkatan kapasitas sumberdaya manusia pemangku kepentingan dalam pengelolaan pesisir terpadu adalah pengembangan kapasitas pemangku kepentingan dalam pengelolaan wilayah pesisir terpadu pada bidang tata ruang laut, pariwisata, perikanan dan/atau konservasi yang meliputi:

- 2.1. Terlaksananya lima kegiatan peningkatan kapasitas di lokasi target
- 2.2. Tersedianya data dasar tentang kapasitas para pemangku kepentingan untuk setiap materi yang dilatihkan
- 2.3. Seratus tujuh belas orang, yang terdiri dari 82 pemangku kepentingan dan 35 masyarakat yang menerima akan pengetahuan dan ketrampilan

2.4. Dua puluh lima persen pemangku kepentingan memiliki pemahaman dan ketrampilan baru akibat dari intervensi program

Keempat sasaran tersebut masuk dalam satu outcome yakni output 2.1. Pelaksanaan kegiatan dari masing-masing sasaran/outcome ini memiliki pembelajaran tersendiri yang kemudian dapat dijadikan acuan untuk pelaksanaan kegiatan selanjutnya. Pembelajaran ini didapatkan dari proses persiapan, pelaksanaan, hingga pelaporan suatu kegiatan. Pembelajaran dari sasaran pengembangan kapasitas pemangku kepentingan dalam pengelolaan wilayah pesisir terpadu pada bidang tata ruang laut, pariwisata, perikanan dan/atau konservasi adalah sebagai berikut:

- Pelatihan, training ataupun workshop yang dilakukan mampu membuat para peserta menjalin komunikasi bahkan setelah kegiatan selesai dilaksanakan. Hal ini dilakukan dengan cara membuat whatsapp group yang dapat digunakan sebagai wadah bertukar informasi dan silaturahmi antar alumni pelatihan.
- Capaian peningkatan kapasitas peserta pelatihan dari semua pelatihan ataupun training yang dilakukan menunjukkan hasil diatas target awal. Hal ini menunjukkan bahwa peserta dapat menyerap materi dengan baik dan dapat membantu peserta yang merupakan pemangku kepentingan untuk dapat membantu percepatan implementasi RZWP-3-K di Provinsi Papua Barat.
- Meskipun seluruh kegiatan pengembangan kapasitas pemangku kepentingan dalam pengelolaan wilayah pesisir terpadu pada bidang tata ruang laut, pariwisata, perikanan dan/atau konservasi dapat dikatakan berhasil, terdapat hal-hal yang perlu menjadi catatan untuk kegiatan pelatihan kedepan. Catatan tersebut terkait dengan perlu adanya koordinasi yang matang antara peserta dan panitia saat pelaksanaan *field trip* supaya kegiatan tersebut dapat berjalan lancar dan optimal. Dalam salah satu kegiatan pelatihan yang dilakukan yakni training of trainer (TOT) dan training workshop fasilitator ICZM di Bali, kegiatan *field trip* tidak berjalan dengan optimal karena keterbatasan waktu dan keinginan peserta untuk menikmati keindahan alam Nusa Penida. Selain hal tersebut, pembelajaran dalam pelaksanaan pelatihan yang dapat digunakan untuk kegiatan selanjutnya adalah perlu adanya pemetaan kemampuan dan latar belakang peserta pelatihan, sehingga pelatih ataupun pemateri dapat mengetahui batas minimal dan maksimal dalam penyampaian materi ataupun praktek. Penyesuaian latar belakang Pendidikan, pekerjaan ataupun lingkungan tempat tinggal juga harus dilakukan supaya peserta yang mengikuti pelatihan merupakan peserta yang berpotensi untuk

menyerap ilmu sebaik-baiknya dan membantu menyebarkan ilmu dan pemahaman yang telah didapatkan setelah mengikuti pelatihan.

4.3. Pemulihan ekosistem kritis di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil

Indikator saran/outcome dari pemulihan ekosistem kritis di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah pulihnya ekosistem kritis di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang meliputi:

- 3.1. Tersedianya data dasar atau hasil kajian cepat tentang ekosistem kritis yang ada di lokasi target (output 3.1).
- 3.2. Seratus lima puluh meter persegi (ekuivalen) terumbu karang, satu hektar (ekuivalen) mangrove, lima ratus meter persegi (ekuivalen) lamun sebagai ekosistem kritis yang direhabilitasi yang juga sebagai demoplot/penelitian untuk metode rehabilitasi (rehabilitasi berbasis pengetahuan) (output 3.1).
- 3.3. Enam puluh pemangku kepentingan yang mendapatkan pengalaman dalam rehabilitasi ekosistem pesisir (output 3.1).
- 3.4. Terlaksananya kegiatan pemantauan dan pemeliharaan ekosistem yang direhabilitasi minimal tiga kali dalam setahun (output 3.1).
- 3.5. Dua ribu lima ratus masyarakat yang akan terpapar langsung informasi melalui kegiatan penyadartahuan dan aksi pelestarian ekosistem (output 3.1).
- 3.6. Adanya diseminasi kegiatan rehabilitasi melalui kegiatan media visit atau kegiatan diseminasi lainnya melalui media massa cetak atau online (output 3.2).
- 3.7. Tersedianya material komunikasi dan publikasi proyek (output 3.2).

Pelaksanaan kegiatan dari masing-masing sasaran/outcome ini memiliki pembelajaran tersendiri yang kemudian dapat dijadikan acuan untuk pelaksanaan kegiatan selanjutnya. Pembelajaran ini didapatkan dari proses persiapan ,pelaksanaan, hingga pelaporan suatu kegiatan. Pembelajaran dari sasaran pulihnya ekosistem kritis di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah sebagai berikut:

- Adanya inovasi dan inisiatif warga Kampung Yensawai Barat yang berhasil membuat metode korbong pancang sebagai salah satu teknik rehabilitasi mangrove yang dapat diterapkan di Kampung Yensawai Barat, Raja Ampat.
- Adanya inovasi ecopolybag dari daun pandan yang dapat digunakan sebagai wadah bibit untuk rehabilitasi.
- Target rehabilitasi pada masing-masing ekosistem kritis di Yensawai Barat dapat terpenuhi dan bahkan melebihi target awal.
- Adanya peraturan kampung yang mengatur tentang pengelolaan pesisir dan laut Kampung Yensawai Timur dan Yensawai Barat.

- Pelaksanaan rehabilitasi harus memperhitungkan waktunya. Hal ini berkaitan dengan kondisi, iklim dan cuaca alam.
- Keberhasilan rehabilitasi ekosistem kritis di Kampung Yensawai Barat menarik donor lain untuk dapat melanjutkan kegiatan rehabilitasi di wilayah tersebut. Contoh donor yang sudah melakukan kerjasama lanjutan adalah CSR dari PLN Persero.
- Perlu adanya rancangan khusus dalam penyebaran informasi pelaksanaan kegiatan di media sosial. Hal ini untuk menghindari adanya kondisi yang tidak diinginkan seperti media sosial terkena *hack* dan terblokir.
- Pemetaan calon penerima informasi proyek dan bentuk transfer informasi harus dimatangkan. Kondisi tersebut berkaitan dengan perbedaan daya tangkap informasi dari masing-masing latar belakang.
- Penyebaran informasi program sudah diliput oleh media lokal seperti Radar Sorong, media nasional seperti Indosiar hingga media internasional seperti NatGeo. Penyebaran informasi ini membuat masyarakat luas dapat mengetahui keberhasilan program yang telah dilaksanakan oleh PKSPL IPB.
- Perlu adanya koordinasi terkait pengumpulan dokumentasi, infografis maupun video pendukung dalam penyebaran informasi program. Hal ini untuk mengurangi kemungkinan dokumen tercecer dan tidak dimanfaatkan secara optimal.
- List berita dan publikasi yang telah diterbitkan sebaiknya dimasukkan dalam bank data yang kemudian dapat menjadi acuan jika suatu saat list berita tersebut dibutuhkan.

5. Kesimpulan dan Rekomendasi

Sebagian besar kegiatan penunjang *outcome* yang telah dijelaskan sebelumnya berjalan dengan sangat baik dan memenuhi target. Sayangnya masih ada beberapa kegiatan yang belum terselesaikan secara baik dan masih perlu pengawalan khusus. Pembelajaran yang telah dijabarkan dari buku ini dapat menjadi patokan dan acuan dalam pelaksanaan kegiatan selanjutnya supaya kegiatan dapat lebih berjalan dengan baik. Adapun keberhasilan suatu program selain dari pembelajaran program sebelumnya juga tetap mempertimbangkan faktor internal dan eksternal yang perlu di kelola secara optimal.



Daftar Pustaka

Informasi lebih lanjut, hubungi:

**Project Management Office (PMO)
ICM COREMAP-CTI**

Kampus IPB Baranagsiang
Jl. Raya Pajajaran 1 Kota Bogor 16127 Indonesia
Telp: +62-51 8374726, 8374820, 8374839
Fax: +62-51 8374839
Email: pmo.icm-coremap.cti@pksplipb.or.id
Website: <http://www/pksplipb.ac.id>